

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang seperti sekarang ini, peran sektor UMKM sangat penting dan dinilai dapat mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Seperti diketahui bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Adanya kontribusi UMKM di Kabupaten Buleleng ini mampu menghadapi krisis ekonomi dan mampu menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar masyarakat di kabupaten Buleleng. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat perkembangan perekonomian.

Secara umum, beberapa penyebab UMKM di Kabupaten Buleleng jarang mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan, diantaranya UMKM di Buleleng mayoritas belum menyadari pentingnya pencatatan keuangan usahanya. Padahal dengan adanya pencatatan keuangan, seperti pembukuan mengenai kegiatan operasional usaha, pelaku UMKM di Buleleng akan dapat melihat perkembangan usahanya apakah mengalami keuntungan atau kerugian sehingga mampu menentukan sehat atau tidaknya usaha yang dijalankan.

Berdasarkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2023) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34%, kemudian mengalami penurunan sebesar 0,34% pada tahun 2019 sehingga kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 60,00%. Selanjutnya pada tahun 2020

kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,00% sehingga mengalami peningkatan sebesar 1,00%. Kemudian untuk tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit terhadap UMKM berkontribusi terhadap PDB sejumlah 61,07% dan 61,09%. Pada tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2023 kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60% sehingga mengalami penurunan sebesar 1,00%. Kemudian pemerintah di Kabupaten Buleleng terus mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memasuki era ekosistem digital. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2022) jumlah UMKM yang telah memasuki ekosistem digital mencapai 20,76 juta unit. Jumlah ini sudah meningkat 26,6% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 16,4 juta UMKM di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa sudah ada 32,44% dari 64 juta unit UMKM yang telah memasuki ekosistem digital.

Di era yang serba digital, pelaku UMKM mayoritas masih buta terhadap akuntansi. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pelaku UMKM menganggap bahwa sangatlah rumit menyusun laporan keuangan berdasar atas standar yang berlaku, sehingga masih banyak UMKM membuat pencatatan keuangan hanya sebatas pembukuan tentang pemasukan dan pengeluaran uang yang berkaitan dengan kegiatan usaha

Kinerja keuangan merupakan penentuan melalui ukuran tertentu yang mana dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan (Kusumadewi, 2017). Kinerja keuangan juga didefinisikan sebagai penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba untuk keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukannya upaya esensial terkait

peningkatan kinerja UMKM.

Kinerja keuangan di pengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah *Resource Based Theory*. *Resource-Based Theory* merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Wernerfelt (1984) yang menguraikan sebuah bisnis akan semakin unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki, menguasai, dan memanfaatkan sumber daya atau aset-aset strategis yang penting (aset berwujud dan tidak berwujud). Berdasarkan *Resource-Based Theory*, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM adalah modal yang kurang memadai, pengelolaan keuangan yang kurang mampu dilakukan secara baik dan kurangnya memafaatkan penggunaan teknologi yang dimana salah satunya ialah *e – payment*.

Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja UMKM berdasarkan *Resource Based Theory* adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan kajian yang menyeluruh guna menghilangkan berbagai macam hambatan terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan jasa lembaga keuangan oleh masyarakat (Yanti, 2019). Selain itu, inklusi keuangan juga didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akses permodalan yang baik merupakan hal yang dapat mendukung usaha agar terus bertahan dan berkembang. Inklusi keuangan sangat diperlukan oleh UMKM, namun ada berbagai hal yang menghambat permodalan pemilik usaha dari lembaga keuangan. Inklusi keuangan sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk dapat mengakses sumber permodalan yang digunakan dalam memulihkan usaha pasca

pandemi Covid-19 dan membiayai operasional UMKM untuk dapat terus melanjutkan aktivitas bisnisnya. Inklusi keuangan yang tinggi mampu mendukung UMKM untuk bersaing dengan pembisnis lain sehingga keberlanjutan usahanya dapat dipertahankan. Inklusi keuangan sangat penting bagi sebuah perusahaan, termasuk juga UMKM yang sering mengalami permasalahan terkait akses permodalan.

Permasalahan terkait inklusi keuangan di Kabupaten Buleleng, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Meskipun tergolong masih rendah, angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK tahun 2016, yaitu indeks indeks inklusi keuangan sebesar 67,8%. Hal ini menunjukkan masyarakat di Buleleng secara umum mempunyai kemampuan yang masih kecil dalam mengakses berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan, yang termasuk juga didalamnya UMKM. Otoritas Jasa Keuangan memiliki komitmen tinggi dalam mendorong peningkatan inklusi (OJK,2021). Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM masih menunjukkan ketidak konsistenan. Penelitian Laila dan Sihotang (2022) menunjukkan inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian Hilmawati & Kusumaningtias (2021) menunjukkan inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keberlangsungan sektor UMKM. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa penelitian terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM masih sangat perlu dan sangat penting untuk dilakukan.

Pengelolaan keuangan (*financial management*) menjadi faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM berdasarkan *Resource-Based*

Theory. Pengelolaan keuangan menyangkut kegiatan perencanaan usaha, pengelolaan kas dan pengendalian kegiatan keuangan. Manajemen keuangan ini dilakukan untuk mengatur keuangan dalam usaha yang berukuran kecil, mulai dari pendanaan, manajemen kas, dan kebutuhan untuk pengembangan usahanya (Husnan, 2010). Pengelolaan keuangan juga didefinisikan seluruh proses yang dilakukan untuk mendapatkan pendapatan perusahaan dengan meminimalkan biaya, selain itu dalam penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Ruang lingkup pengelolaan keuangan mencakup kebijakan-kebijakan keuangan yang harus diambil untuk mendapatkan laba yang maksimum bagi pemilik perusahaan.

Kesuksesan promosi Produk pembayaran elektronik, jumlah pengguna produk ini semakin meningkat, seperti produk *e-payment* ovo tidak hanya berkampanye secara online, namun juga penawaran langsung ke konsumen dengan riset sekaligus *ecommerce* Penerapan kampanye dengan sistem pembayaran e-makse memberikan dampak yang signifikan Tentang frekuensi penggunaan pembayaran elektronik (Mishkin, 2012).

Berdasarkan hasil observasi awal menemukan fakta bahwa performa kinerja yang ada di Kabupaten Buleleng memiliki presentase yang paling tinggi yaitu 20,79% namun cenderung stuck dan hanya berdiam di tempat selama pelaksanaan usahanya di dibandingkan di Kabupaten lain . Hal ini penulis paparkan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Performa Kinerja UMKM di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Performa Kinerja	Persentase Kinerja
1	Buleleng	5.231	20,79%
2	Denpasar	4.308	17,12%
3	Gianyar	4.249	16,88%
4	Badung	3.594	14,28%
5	Tabanan	2.511	9,98%
6	Jembrana	2.370	9,42%
7	Bangli	1.222	4,86%
8	Karangasem	1.067	4,24%
9	Klungkung	614	2,44%
Total		25.166	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) (lampiran 4)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki tingkat kinerja performa kurang baik yaitu 5.231 atau 20,79%, sehingga usaha cenderung stuck dan hanya berdiam di tempat selama pelaksanaan usahanya di dibandingkan di Kabupaten lain. Performa usaha merupakan segala hal terkait peningkatan, penurunan, maupun konstan yang berhubungan dengan perkembangan usaha dari pelaku UMKM. Tingkat performa usaha diukur berdasarkan jumlah aset maupun laba usaha yang diperoleh UMKM dalam satu periode.

Menurut Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali, pada tahun 2022 penulis menemukan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 66.368 UMKM yang penulis paparkan melalui tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Sektor Tahun 2022

	Sektor	Jumlah
1	Perdagangan	48.043
2	Industri Pertanian	8.121
3	Industri Non – Pertanian	3.754
4	Aneka Jasa	6.450
Jumlah		66.368

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Bali 2023 (lampiran 5)

Pada tabel diatas UMKM terbanyak no 2 di Buleleng bergerak pada sektor industri pertanian yakni sebanyak 8,121, kemudian ditelusuri lebih mendalam jika memanfaatkan sebuah potensi yang dimiliki Buleleng, pertanian, UMKM yang didukung untuk mengintegrasikan dengan pariwisata. Karena jika kita hanya mengandalkan pariwisata resistensinya tinggi, sehingga dari potensi pertanian dan UMKM mari kita gerakan kedepan itu pada hirilisasinya.”.Menurut Lihadnyana, dengan memberikan ruang serta fasilitas bagi hasil produk pertanian dan UMKM dalam menyongsong ekonomi digital serta pemasaran digital maka pondasi ekonomi Buleleng akan semakin kuat.

Pertanian di Buleleng sangat berbeda dengan kabupaten-kabupaten di Bali Selatan. Di Buleleng, 65 persen masyarakat hidup dari sektor pertanian. Setelah pada masa kepemimpinan pertama, (Agus Suradnyana Bupati Buleleng 2012-2022) telah menginstruksikan jajarannya di Pemkab Buleleng untuk lebih fokus membangun infrastruktur agar mampu membangun koneksitas di desa sehingga pergerakan masyarakat seperti pergerakan ekonomi, distribusi material, pupuk, dan produk pasca panen bisa lebih mudah. “Nah setelah infrastruktur selesai, sekarang kita menggerakkan sektor yang bisa memberikan kontribusi kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi yaitu pertanian. (Pembab Buleleng)

Berdasarkan pemaparan diatas, maka ditemukan hasil penelitian sebelumnya masih terdapat inkosistensi pada variabel inklusi keuangan, pengelolaan keuangan dan penggunaan *e-payment* terhadap kinerja keuangan UMKM, hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh dari masing-masing variabel sebelumnya. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Pengaruh Inklusi Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan *E-payment* Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti, maka di lakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Performa kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng mempunyai presentase paling tinggi di Provinsi Bali namun cenderung stuck dan hanya berdiam di tempat selama pelaksanaan usahanya di bandingkan di Kabupaten lain.
2. Tidak menetapnya kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian lebih terfokus dan cakupannya tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah dan memfokuskannya pada Inklusi Keuangan, Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan *E-Payment* Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah terdapat pengaruh penggunaan *e-payment* terhadap kinerja keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng?
4. Apakah terdapat pengaruh inklusi keuangan, pengelolaan keuangan, dan penggunaan *e-payment* terhadap kinerja keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng.
2. Mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng.
3. Mengetahui pengaruh *E- Payment* untuk mempermudah pelaku UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan pengembangan pengetahuan mengenai pengaruh inklusi keuangan, pengelolaan keuangan dan penggunaan *e-payment* terhadap kinerja keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng.

2) Manfaat Praktis

a. Peneliti

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pengaruh inklusi keuangan, pengelolaan keuangan dan penggunaan *e-payment* terhadap kinerja keuangan UMKM Sektor Industri Pertanian di Kabupaten Buleleng.

b. Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau motivasi terhadap pelaku UMKM untuk mengetahui inklusi keuangan, pengelolaan keuangan dan menggunakan *e-payment*.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan untuk mempermudah Masyarakat yang ingin membuka usaha kecil kecilan sehingga bisa mengetahui lebih lanjut pengaruh inklusi keuangan pengelolaan keuangan dan *e-payment*.

d. Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refensi Menyusun

penelitian selanjutnya mengenai inklusi keuangan, pengelolaan keuangan dan penggunaan *e- payment* terhadap kinerja keuangan.

